**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TERHADAP HASIL PEMBANGUNAN DI KABUPATEN KOLAKA \***

**HASRI’\*\***

Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Makassar

e-mail: asryhasri@gmail.com

**ABSTRAK**

Dengan diberlakukannya otonomi daerah oleh pemerintah pusat yang mengedapankan kemandirian daerah serta diberikan kebebasan kepada daerah untuk mengatur daerahnya masing-masing diharapakan dengan meningkatnya PAD berbanding lurus dengan pembangunan di suatu daerah. Oleh karena itu yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (i) Bagaimana pengaruh pajak daerah terhadap hasil pembangunan di Kabupaten Kolaka. (ii) Bagaimana pengaruh retribusi daerah terhadap hasil pembangunan di Kabupaten Kolaka. (iii) Bagaimana pengaruh hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap hasil pembangunan di Kabupaten Kolaka. (iv) Bagaimana pengaruh lain-lain pendapatan asli daerah yang sah berpengaruh terhadap hasil pembangunan di Kabupaten Kolaka. (v) Bagaimana pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolahan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah secara bersama-sama terhadap hasil pembangunan di Kabupaten Kolaka.

Tujuan penelitian ini adalah (i) Untuk mengetahui pengaruh pajak daerah terhadap hasil pembangunan di Kabupaten Kolaka. (ii) Untuk mengetahui pengaruh retribusi daerah terhadap hasil pembangunan di Kabupaten Kolaka. (iii) Untuk mengetahui pengaruh hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap hasil pembangunan di Kabupaten Kolaka. (iv) Untuk mengetahui pengaruh lain-lain pendapatan asli daerah yang sah berpengaruh terhadap hasil pembangunan di kabupaten kolaka. (v) Untuk mengetahui pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolahan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah secara bersama-sama terhadap hasil pembangunan di kabupaten kolaka. Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui data *time series.*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (i) pajak daerah tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap hasil pembangunan. (ii) retribusi daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap hasil pembangunan. (iii) hasil pengelolaan kekayaan daerah tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap hasil pembangunan. (iv) lain pendapatan asli daerah yang sah berpengaruh dan signifikan terhadap hasil pembangunan. (v) Selain pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain PAD yang sah secara simultan berpengaruh terhadap hasil pembangunan.

**Kata Kunci :** Pendapatan Asli Daerah, Hasil Pembangunan.

\* Penelitian ini dilakukan sebagai syarat untuk Mencapai Derajat Magister di Program Pacasarjana Universitas Negeri Makassar

\*\*Mahasiswa Pendidikan Ekonomi, Pascasarjana Universitas Negeri Makassar

**ABSTRACT**

With the enactment of regional autonomy by the central goverment which prioritized regional independenceand being given teh freedom to organize their area, it esxpected that by the intreasing of Local Generated Revenue, it is directly proportional to the area development. Therefore, the formulations of teh problems of the research are (i) How is the influence of local tax on development results in Kolaka District, (ii) How in the influence of local retribution on development results in Kolaka District, (iii) How is the influence of separated regional wealth result on development results in Kolaka District, (iv) How other legitimate local generated revenue give influence on development result in Kolaka District, (v) How is the influence of local tax, local retribution, separated regional wealth results, and legitimate local generated revenue simultaneously on development results in Kolaka District.

The objectives of the research are to discoper (i) the influence of local tax toward development results in Kolaka District, (ii) the influence of local retribution on development results in Kolaka District, (iii) the influence of separated regional wealth results on development results in Kolaka District, (iv) other legitimate local generated revenue give influence on development result in Kolaka District, (v) the influence of local tac, local retribution, separated regional wealth results, and legitimate local generated revenue simultaneously on development results in Kolaka District. The research employed quantitative approach. Data were collected by employing time series data technique.

The results of the research reveal that (i) local tax has on significant influence on development results, (ii) local retributions has negative and significant influence on development results, (iii) regional wealth managemement results have on signficant influence on development results, (iv) legitimate local generated revenue has significant influence on development results, (v) local tax, local retributions, regional wealth management results, and legitimate local generated revenue simultaneously have influence on development results.

**Key Word :** Own Source Revenue, The Resuts of the Development

**PENDAHULUAN**

Berdasarkan UU No.12 Tahun 2008 tentang pemerintah daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang pertimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta UU No.28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Dimana Pemerintah Daerah baik Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten maupun Kota telah diberikan wewenang untuk mengatur rumah tangga daerahnya sendiri melalui otonomi daerah yang mengedepankan kemandirian daerah. Pemberian otonomi kepada daerah akan menjadi salah satu alternatif untuk meningkatkan peran nyata dan kemandirian daerah dalam upaya meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata dalam hal ini pembangunan sektor daerah. Yang mana otonomi daerah adanya kemandirian dibidang pembiayaan atau keuangan. Keuangan ini penting karna tidak ada satupun kegitan pemerintah yang tidak memerlukan biaya dan bisa dikatakan bahwa keuangan merupakan salah-satu sumber kehidupan daerah yang mana otonomi tanpa di tunjang oleh kemampuan keuangan akan lemah.

Dengan diberlakukannya otonomi daerah oleh pemerintah pusat yang mengedepankan kemandirian daerah serta diberikan kebebasan kepada daerah untuk mengatur daerahnya masing-masing maka yang menjadi sumber penerimaan daerah yang diatur dalam UU No 33 Tahun 2004, sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari :
2. Hasil pajak daerah
3. Hasil retribusi daerah
4. Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan
5. Lain- lain pendapatan asli daerah yang sah
6. Sumbangan dari pemerintah
7. Dan lain-lain pendapatan yang sah

Pada dasarnya semakin besar kontribusi Pendapan Asli Daerah (PAD) dalam anggaran dan belanja daerah (APBD), maka semakin kecil tingkat ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat, baik dalam bentuk *block grand* maupun *specific grand.*  Sebaliknya semakin rendah kontribusi PAD dalam APBD maka semakin besar ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat, sehingga peran pemerintah pusat mengalokasikan anggaran ke daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah cenderung dominan. Otonomi daerah membawa dampak postif bagi daerah yang memiliki potensi sumber daya alam. Yang merupaka salah-satu yang dihadapi pemerintah daerah/kota pada umumnya keterbatasan dana yang berasal dari daerah sendiri (PAD), sehingga proses otonomi daerah belum bisa berjalan sebagaimana mestinya.

Pemerintah daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) haruslah dengan bijak melihat potensi daerah dan menyaring apa saja yang dapat dimasukkan kedalam penerimaan PAD, kemudian ditentukan dalam Peraturan Daerah maka dari itu dibutuhkan sosialisasi dari PEMDA untuk memberikan informasi dan pemahaman yang seluas-luasnya mengenai PAD pentingnya bagi pembangunan daerah untuk kesejahteraan masyarakat, sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau yang dibayar sendiri oleh wajib pajak, Pemerintah Kabupaten Kolaka melalui Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka mengelola 8 jenis Pajak Daerah yaitu :

1. Pajak Hotel.
2. Pajak Restoran.
3. Pajak Hiburan.
4. Pajak reklame
5. Pajak Penerangan Jalan.
6. Pajak air tanah.
7. Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan.
8. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BHTB).

Kemudian dari sektor Retribusi daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 Pemerintah Kabupaten Kolaka menetapkan 3 jenis Retribusi yang dipungut berdasarkan peraturan daerah terdiri dari:

1. Retribusi Jasa umum, berdasarkan peraturan Kabupaten Kolaka ada 18 jenis retribusi jasa umum pemerintah Kabupaten Koalaka.
2. Retribusi Jasa Usaha, berdasarkan peraturan Kabupaten Kolaka ada 11 jenis jasa usaha yang dikelolah pemerintah Kabupaten Kolaka.
3. Retribusi Perjanjian tertentu, berdasarkan peraturan Kabupaten Kolaka ada 26 retribusi perjanjian yang di kolelolah pemerintah Kabupaten Kolaka.

Untuk mewujudkan realisasi sumber pendapatan Daerah maka diperlukan kerja keras jajaran Dinas Pendapatan Kabupaten Kolaka untuk mengkoordinasikan target Pendapatan Asli Daerah serta merealisasikannya bersama-sama dengan unit-unit satuan kerja penghasil PAD, untuk selanjutnya dapat dipergunakan membiayai belanja Pemerintah Kabupaten Kolaka yang diataur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, berdasarkan UUD No. 32 Tahun 2003 sebagai rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD serta ditetapkan dalam peraturan daerah (PERDA).

Maka dari itu untuk mendorong program percepatan pembangunan pemerintah kabupaten kolaka salah satu sumber pembiayaan APBD adalah pendapatna asli daerah (PAD).

Tabel Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kolaka Tahun 2007 – 2016



*Sumber : Diolah Menurut Data Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka*

Kemampuan Dinas Pendapatan Daerah memperoleh PAD dikategorikan efektif apabila rasio ini mencapai 1 atau 100%. Pada tabel di atas pendapatan asli daerah pada tahun 2007 realisasi yang diperoleh tidak mecapai target kemudian pada tahun 2008 realiasi yang diperoleh melebihi target yang diestimasin, pada tahun 2009 dan 2010 jauh dari target yang dosetimasi tentu ini menjadi menjadi masalah dalam penerimaan daerah, pada tahun 2011-2015 realiasi yang diperoleh melebihi target yang diestimasi yang bererti bahwa penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabuapten Kolaka sangat baik, kemudian pada tahun 2016 kembali realisasi yang diperoleh kembali mengalami penurunan. Dari realisai tersebut dapat ditarik sutau kesimpulan bahwa pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kolaka 5 tahun terakhir sangat baik namun pemerintah daerah dalam membuat etimasi belum maksimal yang berarti bahwa ada potensi daerah yang belum dimasukkan dalam target sehingga pada saat pemungutan realisasi jauh dari target bahkan melebihi target yang diestimasi. Dengan memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kolaka tentu dapat meningkatkan anggaran APBD sehingga bisa direalisasikan dalam anggaran pembangunan.

Meningkatnya PAD Kabupaten Kolaka beberapa tahun terakhir belum berbanding lurus dengan pembangunan di Kabupaten Kolaka dapat dilihat pada Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabapaten Kolaka jumlah penduduk sebanyak 235.655 jiwa dengan jumlah penduduk miskin pada tahun 2014 sebanyak 56.30 kemudian pada tahun 2015 senayak 53,64 ini menunjukkan jumlah penduduk termiskin terbanyak diantara 17 Kabupaten yang ada di Sulawesi Tenggara. Kondisi ini menegaskan perlunya pemerintah daerah membenahi pelayanan publik di bidang pendidikan dan kesehatan untuk menunjang kesejahteraan masyarakat. Selain itu pemerintah daerah juga harus bekerja keras mendorong seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk memacu pembangunan dengan meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor dan kegiatan utama daerah

Berdasarkan uraian tersebut terkait target dan realisai pendapatan asli daerah Kabupaten Kolaka dapat dilihat bahwa realisasi melebihi target yang diestimasi. Maka dari itu penulis tertaik untuk meneliti Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kolaka terhadap hasil pembangunan dalam karya ilmiah yang berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Hasil Pembangunan di Kabupaten Kolaka”. Untuk itu tujuan peneliti adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh pajak daerah terhadap hasil pembangunan di Kabupaten Kolaka.
2. Untuk mengetahui pengaruh retribusi daerah terhadap hasil pembangunan di Kabupaten Kolaka.
3. Untuk mengetahui pengaruh hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap hasil pembangunan di Kabupaten Kolaka.
4. Untuk mengetahui pengaruh lain-lain pendapatan asli daerah yang sah berpengaruh terhadap hasil pembangunan di Kabupaten Kolaka.
5. Untuk mengetahui pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolahan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah secara bersama-sama terhadap hasil pembangunan di Kabupaten kolaka.

**METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif dengan alasan data yang akan digunakan nantinya dalam penelitian ini adalah data yang bersifat kauntitatif. Penelitian ini akan dilaksanakan di Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara. Yang menjadi alasan memiliki Kabupaten Kolaka sebagai lokasi penelitian adalah dengan melihat realisasi pendapatan asli daerah melebihi target yang diestimasi dan seberapa besar pengaruhnya terhadap hasil pembangunan.

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Kemudian sampel menurut Sugiono (2009: 81) adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan penelitian tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka penelitian dapat mengguanakan sampel yang diambil dari populasi itu. Begitupun dalam penelitian ini data yang digunakan adalah *time sries*, maka dari itu populasi yang digunakan sekaligus menjadi sampel yaitu, pajak daerah, retribusi daerah, hasil peneglolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dan pembangunan daerah 2007-2016 (10 Tahun).

Adapun teknik pengumpulan data adalah memperoleh data yang dilakukan dengan merekam kejadian, menghitungnya, mengukurnya, dan mencatatnya. Dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data yaitu:

1. Observasi

Suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan pengamatan dan pencatatan secara sistematis, objektif, logis dan rasional mengenai berbagai fenomena yang ada di lapangan, Hal ini dimaksudkan untuk lebih menjamin objektivitas data di lapangan. Kemungkinan untuk dicatat secara langsung dapat dilakukan sehingga dapat dikontrol validitasnya dan reabilitasnya.

1. Wawancara

Wawancara dilakukan kepada pegawai Dinas Pendapatan Daerah yang mengetahui secara luas menyangkut variabel-variabel penelitian dengan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan.

1. Dokumentasi

Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data yang tersedia adalah berbentuk surat-surat, catatan harian, cenderamata, laporan, artefak, foto, dan sebagainya. Sifat utama data ini tak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di waktu silam. Secara detail bahan dokumenter terbagi beberapa macam, yaitu otobiografi, surat-surat pribadi, buku atau catatan harian, memorial, klipping, dokumen pemerintah atau swasta, data di server dan flashdisk, data tersimpan di website, dan lain-lain yang ada di kabupaten Kolaka, karna pada pada dasarnya penelitian ini menggunakan data skunder berupa data *Time Series.*

Analisis data merupakan tahapan yang kritis dalam proses penelitian yang bertujuan menyediakan informasi untuk memecahkan masalah. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. **Uji Asumsi Klasik**

Dalam menggunakan alat analisis regresi, perlu dilakukan pengujian asumsi klasik, agar hasil analisis regresi ini menunjunkkan hubungan yang valid.

* 1. **Uji Normalitas**

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakan dalam model regresi, baik variabel dependen maupun variabel independen, keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak.. Pedoman pengambilan keputusan:

1. Nilai Sig. Atau signifikansi atau Nilai Probabilitas > 0,05 maka, distribusi adalah normal.
2. Nilai Sig. Atau Sifnifikansi atau Nilai Probabilitas < 0,05 maka, distribusi adalah tidak normal.
	1. **Uji Autokorelasi**

Uji autokorelasi digunakan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi ada korelasi antar kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1.

Pengujian yang digunakan untuk mengetahui adanya autokorelasi adalah uji statistik *Durbin Watson* diantaranya:

1. Terjadi autokorelasi positif (0<d<dl)
2. Daerah keragu-raguan (dl<d<du)
3. Tidak terjadi autokorelasi (du<d<4– du)
4. Daerah keragu-raguan (4–du<d<4–dl)
5. Terjadi autokorelasi negatif (4–dl<d4)
	1. **Uji Multikolinearitas**

Multikolinearitas dalam model regresi yang dihasilkan. Artinya, antarvariabel independen yang terdapat dalam model memiliki hubungan yang sempurna atau mendekati sempurna (Koefisien korelasinya tinggi atau bahkan 1). Untuk mengetahui apakah terjadi multikolinearitas didalam model regresi adalah sebagai berikut:

1. Menurut Gujarati (2015: 44), mengatakan bahwa tanda paling jelas adanya multikolinearitas adalah ketika R2 sangat tinggi tetapi tidak satupun koefisien regresi signifikan secara statistik atas dasar uji t (secara individula)
2. Multikolinearitas dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan VIF *(variance Inflation Factor)* kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel bebas manakan yang dijelakan oleh variabel lainnya. *Tolerance* mengukur variabolitas variabel bebas yang terpilih yang tidak dapat dijelakan oleh variabel bebas lainnya. Jadi nilai *Tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi dan menunjukkan adanya multikolinearitas yang tinggi. Nilai batasan yang umum dipakai adalah nilai *Tolerance* 0,10 atau sama dengan nilai VIF lebih besar dari 10. Rumus nilai VIF adalah 1/*Tolerance.*
3. Menganalisis matrik korelasi variabel-variabel bebas. Jika antar variabel bebas ada korelasi yang cukup tinggi (umumnya diatas 0,90), maka hal ini merupakan adanya indikasi adanya multikolinearitas.
	1. **Uji Heteroskedastisitas**

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji, apakah model regresi terjadi ketidak samaan variabel dari residula satu pengamatan yang lain, salah satu cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas itu dengan melihat grafik plot antar nilai ptrediksi dengan residualnya (Gujarati, 1995). Adapun dasar untuk menganalisinya adalah:

1. Jika ada polah tertentu (bergelombang, melebar, kemudian menyempit) maka, mengindikasikan bahwa telah terjadi *heteroskedastisitas.*
2. Jika ada polah tertentu serta titik menyebar diatas dan dibawah angka *nol* pada sumbu Y maka, tidak terjadi *heteroskedastisitas.*
3. **Metode Regresi Berganda**

Dalam menganalisis data penelitian ini digunakan metode statistik dengan memakai analisis regresi linear berganda digunakan untuk menganalisis pengaruh variabel-variabel bebas dalam penelitian ini adalah pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terhadap variabel terikat hasil pembangunan di kabupaten kolaka. Adapun persamaan analisis regresi linear berganda pada penelitian ini yaitu:

Y= a + b1X1+ b2X2+ b3X3 +b4X4+e

Keterangan:

Y = Hasil Pembangunan

X1 = Pajak Daerah

X2 = Retribusi Daerah

X3   =Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan

X4 = Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

b1b2b3 = Koefesien Regresi

a = Konstanta

e = Standar Eror

Berdasarkan hasil regresi linear berganda tersebut, selanjutnya dapat dianalisis koefisien determinasi (R2), yaitu koefisien determinasi parsial untuk mengukur secara terpisah. Sedangkan signifikan tidaknya pengaruh tersebut dapat dilihat dari hasil uji F dengan tingkat kepercayaan 95% atau a = 0,05%.

**3. Uji Hipotesis**

**a. Uji F (Simultan)**

Hal ini dilakukan dengan cara pengujian terhadap variabel-variabel independent secara bersama-sama yang dilakukan untuk melihat pengaruh variabel independent secara simultan terhadap variabel dependent. Dalam penelitian ini melakukan uji F dengan mengguanakn probabilitas dengan taraf signifikan 0,05, Dalam penelitian ini melakukan uji F dengan mengguanakn probabilitas dengan taraf signifikan 0,05, perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$Fhitung=\frac{\begin{array}{c}R²\\K-1\end{array}}{(1-R²)(n-K)} $$

Keterangan:

R² : Koefisien determinasi

n : Jumlah sampel

K : Banyaknya parameter /koefisien regresi

Adapaun Hipotesis yang digunakan nantinya, sebagai berikut:

1. H0 : β1 = β2 = β3 = β4 = 0, maka variabel independen secara bersama-sama tidak mempengaruhi variabel dependen.
2. H1 : β1 ≠ β2 ≠ β3 ≠ β4 ≠ 0, maka variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen.

Dengan demikian dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Jika fhitung ≥ ftabel Berarti:

H0 ditolak dan H1 diterima yang berati bahwa variabel pajak daerah (X1) retribusi daerah (X2) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (X3) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (X4) berpengaruh secara simultan terhadap hasil pembangunan (Y).

1. Jika fhitung ≤ ftabel Berarti:

H0 diterima dan H1 ditolak yang berarti bahwa variabel pajak daerah (X1) daerah (X2) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (X3) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (X4) tidak berpengaruh secara simultan terhadap hasil pembangunan (Y).

**b. Uji t (Parsial)**

Uji t dilakukan dengan pengujian variabel-variebel independen secara parsial (individu), digunakan untuk mengetahui sifnifikansi dan pengaruh variabel independen secara individu terhadap variasi veriabel dependen.

Uji t hitung dapat dilakukan dengan rumus sebagai berikut:

$$t=\frac{bt}{sbt}$$

Dimana b merupakan koefisisen regresi masing-masing variabel bebas dan sb adalah simpangan baku masing-masing variabel bebas. Adapun taraf signifikan yang digunakan adalah 0,05. Hipotesis dalam uji t adalah sebagai berikut:

1. H0 : β1 = 0, maka variabel independen secara parsial tidak mempengaruhi variabel dependen.
2. H1 : β1 ≠ 0, maka variabel independent secara parsial mempengaruhi veriabel dependen.

Dengan kriteria sebagai berikut:

1. Jika thitung ≥ ttabel Berarti:

H0 ditolak H1 diterima yang bebarti bahwa variabel pajak daerah X1) daerah (X2) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (X3) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (X4) berpengaruh secara parsial terhadap hasil pembangunan (Y).

b) Jika thitung ≤ ttabel Berarti:

H0 diterima H1 ditolak yang bebarti bahwa variabel pajak daerah X1) daerah (X2) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (X3) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (X4) tidak berpengaruh secara parsial hasil pembangunan (Y).

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

1. **Gambaran Umum Kabupaten Kolaka**

Kabupaten Kolaka terletak di jazirah tenggara pulau sulawesi. Secara geografis terletak di bagian barat Provinsi Sulawesi Tenggara, memanjang dari utara ke selatan di antara 3°36’ - 4°35’ lintang selatan dan membentang dari barat ke timur di antara 120°45’ - 121°52’ Bujur timur. Adapun batas-batasanya:

* Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Kolaka Utara
* Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bombana
* Sebelah Timur berbatasan Kabupaten Konawe & Kolaka Timur
* Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Selatan di Teluk Bone.
1. **Variabel Penelitian**
2. **Pajak Daerah**

Tabel Perkembangan Pajak Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2007-2016



*Sumber: Diolah menurut data Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka*

Dari data tersebut dapat ditarik kesimpulan secara garis besar penerimaan pajak daerah Kabuapten Kolaka mengalami kenaikan setiap tahun namun belum dimakasimalkan maka dari itu perlu kerja keras pemerintah untuk melihat potensii pajak daerah untuk dijadikan target dan dapat direalisasikan serta melakukan sosialisasi dengan masyarakat wajib pajak.

1. **Retribusi Daerah**

Tabel Perkembangan Retribusi Daerah Kabupaten KolakaTahun 2007-2016



*Sumber: Diolah menurut data Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka*

Dari data tersebut dapat ditaris suatu kesimpulan sumber penerimaan retribusi daerah belum maksimal dilihat beberapa tahun capaian yang diperoleh jauh dari target yang diestimasi maka dari itu diperlukan pengawasan dari pemerintah.

1. **Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah**

Tabel Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Kabupaten Kolaka Tahun 2007-2016



*Sumber: Diolah menurut data Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka*

Dari data tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa sumber pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan realiasi yang diperoleh cukup baik, perlu pengawasan yang lebih baik sehingga dalam menetukan target maupun dalam percapaiannya tahun-tahun selanjutnya jauh lebih baik.

1. **Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah**

Tabel Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah Kabupaten Kolaka Tahun 2007-2016



*Sumber: Diolah menurut data Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka*

Maka dari itu dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa realisasi penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah cukup baik beberapa tahun melebihi target yang diestimasi, maka dari itu diperlukan pengawasan yang dari pemerintah daerah sehingga realisasi yang diperoleh untuk tahun berikutnya menjadi lebih baik

1. **Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**

Tabel Anggaran Pendapatan dan Belanja Dearah Kabupaten KolakaTahun 2007-2016



*Sumber: Diolah menurut data Badan Pengelolah Keuangan dan Aset Daerah*

Indeks pembangunan manusia dapat digunakan sebagai alat ukur keberhasilan pembangunan di suatu daerah dan merupakan penilaian terhadap pemerataan pembangunan sudah berjalan dengan baik. Sumber dana yang dibutuhkan dalam pembangunan daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah. Semakin mandiri suatu daerah berarti Pendapatan Asli Daerah mampu membiayai pembangunan daerahnya yang direalisasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

1. **Analisis Data**
2. **Uji Asumsi Klasik**

Adapun empat uji asumsi klasik yang digunakan yaitu Uji Normalitas, Uji Autokorelasi, Uji Multikolinearitas, dan Uji Heterokedastisitas.

1. **Uji Normalitas**

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi normal atau mendekati normal. Uji normalitas yang digunakan adalah uji *Kolmogorov-Smirnov Z* dan uji normalitas residual dengan melihat sebaran plot pada data yang telah diuji. Berdasarkan hasil perhitungan analisis diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel Uji Normalitas dengan *Kologmorov-Smirnov Z*

|  |  |
| --- | --- |
|   | Kolmogorov-Smirnov |
| Df | Sig |
| Hasil Pembangunan | 10 | 0,200 |
| Pajak Daerah | 10 | 0,200 |
| Retribusi Daerah | 10 | 0,093 |
| Laba BUMD | 10 | 0,200 |
| Lain-lain PAD yang sah | 10 | 0,200 |

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa nilai sig. *Kolmogorov Smirnov* untuk variabel hasil pembangunan, pajak daerah, retribusi daerah, hasil penelolaan kekayaan daerah dan lain-lain PAD yang sah lebih besar dari 0,05, sehingga bisa disimpulkan bahwa data variabel-variabel dalam penelitian ini terdistribusi dengan normal.



Pada gambar tersebut menunjukkan bahwa persebaran plot data berada pada sekitaran dan sepanjang garis 45o. Dengan demikian menunjukkan bahwa data-data pada model regresi tersebut berdistribusi normal.

1. **Uji Autokorelasi**

Autokorelasi dapat didefinisikan sebagai korelasi anggota serangkain observasi yang diurutkan seperti data menurut waktu (deret waktu/ *time series*) atau dalam *cross section.* Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Ada beberapa cara yang digunkan untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi. Dalam penelitian ini digunakan Uji Autokorelasi dengan Durbin Watson (DW test).

|  |
| --- |
| Tabel Hasil Uji Autokorelasi Durbin Watson |
| **Model**  | **Durbin Watson** |
|
|  1 | 2,681 |
|

Nilai dl dan du dapat dilihat pada tabel *Durbin Watson,* yaitu nilai dl ; du dengan mempertimbangkan tingkat signifikan (α), besarnya sampel yang digunakan (n), dan banyaknya variabel yang menjelaskan (k) dalam penelitian ini taraf signifikan 5% n = 10, dan variabel penelitian k= 4 maka diperoleh nilai dl = 0,3760 dan du = 2,4137. Oleh karena itu (4-du < DW < 4-dl) yaitu 1,5863 < 2,681 < 3,624. Dengan demikina pada penelitian ini tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti karena berada pada daerah keragu-raguan apakah terjadi autokorelasi atau tidak.

1. **Uji Multikolineritas**

Multikolinearitas dapat dilihat dari nilai *tolerance dan* VIF (*Variance inflation Factor)* kudua ukuran ini menunjukkan setiap variabel bebas manakah yang dijelaskan oleh variabel bebas lainya. *Tolerance* mengukur variabilitas variabel bebas yang terpilih yang tidak dapat dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Jadi nilai *tolerance* yang terenda sama dengan nilai VIF yang tinggi dan menunjukkan adanya multikolinearitas yang tinggi. Nilai batasan yang umum dipakai adalah nilai *tolerance* 0,10 atau sama dengan nilai VIF lebih besar dari 10. Rumus nilai VIF adalah 1/*Tolerance.* Adapun hasil output uji multikolinearitas adalah sebagai beriku:



Nilai tolerance dari keempat variabel (X) tersebut yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain PAD yang sah lebih besar dari 10% (0,10) dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) kurang dari 10.00 dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan antara keempat variabel bebas tersebut atau tidak ada masalah multikolinearitas.

1. **Heteroskedastisitas**

Uji heteroskedastisitas adalah suatu keadaan dimana varians dan kesalahan pengganggu tidak konstan untuk semua variabel bebas. Model regresi yang baik dalam suatu penelitian adalah model regresi yang tidak terjadi heteroskedastisitas. Cara untuk mengetahui ada atau tidaknya heteroskedastisitas pada suatu model regresi dilakukan uji *Glesjer*. Uji *Glesjer* dilakukan dengan cara meregresikan antar variabel independen dengan nilai absolut residualnya. Apabila nilai signifikansi antara variabel independen dengan absolut residual lebih besar dari (> 0,05), maka dinyatakan tidak terjadi heterokastisitas. Namun, jika nilai signifikansi antara variabel independen dengan absolute residual lebih kecil (< dari 0,05) maka dinyatakan terjadi heterokadstisitas. Untuk lebih jelas hasil uji heterokedastisitas dengan uji *Glesjer* dapat dilihat pada tabel dibawah ini.



Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa hasil uji heterokedastisitas dengan menggunakan uji *Glesjer* dapat diketahui nilai signifikansi untuk variabel pajak daerah 1,000, retribusi daerah 1,000, hasil pengelolaan kekayaan daerah 1,000 dan lain-lain Pad yang sah 1,000 yang artinya nilai signifikansinya > 0,05, maka dapat dinyatakan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas dalam model regresi penelitian ini.

1. **Analisis Regresi Linear Berganda**

Dalam hal ini regresi linear berganda digunakan untuk mengukur seberapa besar pengaruh variabel independen yakni pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain PAD yang sah terhadap variabel dependen atau hasil pembangunan. Dalam penelitian ini analisis regresi berganda di uji dengan menggunakan alat analisis SPSS *for windows release* 20. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.



**Y = 2,272 + -69,37 X1 + -94,459 X2 + 160,764 X3 + 23,127 X4**

1. Konstanta = 2,272

Nilai konstanta sebesar 2,272 adalah besarnya hasil pembangunan (Y) yang dicapai tanpa memperhatikan tinggi rendahnya pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

1. Pajak daerah (X1) = -69,737

Menunjukkan bahwa variabel pajak daerah (X1) mempunyai nilai koefisien regresi negatif sebesar -69,737, yang berarti bahwa jika ada kenaikan pajak daerah sebesar Rp. 1 akan menurunkan hasil pembangunan di Kabupaten Kolaka sebesar Rp.-69,737

1. Retibusi daerah (X2) = -94,459

Menunjukkan bahwa variabel retribusi daerah (X1) mempunyai nilai koefisien regresi negatif sebesar -94,459, yang berarti jika ada kenaikan retribusi daerah sebesar Rp. 1 akan menurunkan hasil pembangunan di Kabupaten Kolaka sebesar Rp.-94,459.

1. Hasil pengelolaan kekayaan daerah (X3) = 160,764

Nilai koefisien regresi variabel hasil pengelolaan kekayaan daerah sebesar 160,764, hal tersebut menginterprestasikan bahwa adanya peningkatan laba BUMD sebesar Rp. 1 akan meningkatkan hasil pembangunan di Kabupaten Kolaka sebesar Rp.160,764.

1. Lain-lain PAD yang sah (X4) = 23,127

Nilai koefisien regresi variabel lain-lain PAD yang sah sebesar 23,127, hal tersebut menginterprestasikan bahwa adanya peningkatan lain-lain PAD yang sah sebesar Rp. 1 akan meningkatkan hasil pembangunan di Kabupaten Kolaka sebesar Rp. 23,127.

Persamaan Koefisien analisis regresi diatas menunjukkan bahwa hanya ada dua variabel independen yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap hasil pembangunan di Kabupaten Kolaka yaitu retribusi daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

1. **Uji Hipotesis**
2. **Uji Simultan (Uji F)**

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain PAD yang sah secara bersama-sama berpengaruh terhadap hasil pembanguna di Kabupaten Kolaka. Dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Model**  | **F**  | **Sig** |
|
| 1 Regressions | 8,099 | 0,021 |
|  Residual |  |  |
|  Total |   |   |

Uji simultan pada tabel 4.10 nilai F hitung pada analisis tersebut adalah 8,099 lebih besar dari F table yaitu 4,53 dengan taraf signifikan 0,21 yang lebih kecil dari taraf signifikan yang digunakan yaitu 0,05 maka dapat dinyatakan bahwa nilai F hitung yang diperoleh signifikan. Dengan demikian dapat disimpulkan selain pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain PAD yang sah secara simultan berpengaruh terhadap hasil pembangunan di Kabupaten Kolaka.

1. **Uji Parsial ( Uji t)**

Uji t digunakan untuk mengukur besarnya pengaruh secara langsung dari variabel pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain PAD yang sah terhadap hasil pembangunan. Adapun keputusan pengujian terhadap hipotesis yang diajukan adalah t hitung lebih besar dari t tabel dan nilai probalitas lebih kecil dari 0,05 maka dikatakan bahwa pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain PAD yang berpengaruh terhadapa hasil pembangunan. Sebaliknya jika t hitung lebih kecil dari t tabel atau probalitas lebih besat 0,05 maka dapat dikatakan bahwa pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain PAD yang sah tidak berpengaruh terhadap hasil pembangunan. Adapun hasil uji hipotesis secara parsial dapat dilihat pada tabel berikut ini.



1. Variabel pajak daerah (X1) diperoleh hasil thitung sebesar -1,416 dengan signifikan sebesar 0,216 hal ini menunjukkan nilai taraf signifikansinya lebih besar dari 0,05 dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara pajak daerah (X1) dengan hasil pembangunan (Y) di Kabupaten Kolaka dengan memperhatikan variabel X2, X3 dan X4
2. Variabel retribusi daerah (X2) diperoleh hasil thitung sebesar -3,319 dengan sifnifikan sebesar 0,021 yang berarti bahwa hal ini menunjukkan nilai taraf signifikansinya lebih kecil dari 0,05 dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh negatif dan signifikan antara retribusi daerah (X2) dengan hasil pembangunan (Y) di Kabupaten Kolaka dengan memperhatikan variabel X1, X3 dan X4.
3. Variabel hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (X3) diperoleh hasil thitung sebesar 1,933 dengan sifnifikan sebesar 0,111 yang berarti bahwa hal ini menunjukkan nilai taraf signifikansinya lebih besar dari 0,05 dapat disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh dan signifikan antara hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (X3) dengan hasil pembangunan (Y) di Kabupaten Kolaka dengan memperhatikan variabel X1, X2 dan X4.
4. Lain-lain PAD yang sah (X4) diperoleh hasil thitung sebesar 4,288 dengan sifnifikan sebesar 0,008 yang berati bahwa nilai taraf signifikan lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh positif dan signifikan antara lain-lain PAD yang sah terhadapa hasil pemabngunan (Y) di Kabupaten Kolaka dengan memperhatikan variabel X1, X2 dan X3.
5. **Pembahasan Penelitian**
	* + 1. **Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Hasil Pembangunan di Kabupaten Kolaka**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah uji menggunakan alat SPSS 20 menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara pajak daerah terhadap hasil pembangunan di Kabupaten Kolaka, salah satu faktor yang menyebabkan pajak daerah tidak berpengaruh terhadap pembangunan adalah karena masih kurangnya kontribusi pajak daerah terhadap pembangunan dapat dilihat pada tabel pajak daerah beberapa tahun sebelumnya penerimaan pajak daerah belum maksimal atau belum mampu memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pembangunan di Kabupaten Kolaka. hal ini tidak sejalan dengan [Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah](https://www.dropbox.com/s/4fgko9sabg14hua/UU%20No.%2017%20Tahun%202003-pemerintah.net.pdf?dl=1) yang merupaka pajak Daerah salah-satu sumber penerimaan daerah yang cukup besar. Pajak daerah yang dikelola oleh pemerintah Kabupaten Kolaka diantaranya: pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pusat kebugaran/ salon, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak air bawa tanah, bea bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, dan bea perolehan atas tanah dan bangunan.

Penelitian ini sesuai dengan dengan hasil wawancara dengan salah satu karyawan Dinas Pendapatan Daerah yaitu Bapak Asridal, S.H mengemukankan bahwa Dinas Pendapatan Kabupaten Kolaka dalam mentukan target terkadang tidak melihat potensi daerah melainkan melihat realisasi tahun sebelumnya kemudian ditambahkan 10% maka itulah yang menjadi target untuk tahun selanjunya meskipun mereka mengetahui bahwa dalam mentukan target dengan melihat potensi daerah.

Inilah yang menyebabkan pajak daerah Kabupaten Kolaka tidak berjalan dengan efisien sehingga tidak memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap pembangunan Kabupaten Kolaka, berdasarkan data rekapitulasi realisasi penerimaan target pendapatan daerah Kabupaten Kolaka ada beberapa data pajak tidak dimasukkan dalam rekapitulasi penerimaan kemudian masih ada beberapa potensi daerah yang belum dimasukkan dalam target pendapatan pajak daerah seperti pajak pengambilan pasir kuarsa dari beberapa daerah yang ada di Kabupaten Kolaka luput dari pengawasan pemerintah yang berarti bahwa penerimaan pajak daerah Kbaupaten kolaka belum maskimal. Maka dari itu pengawasan perlu ditingkatkan untuk menaksir potensi pajak daerah sehingga penerimaan pajak daerah Kabupaten Kolaka bisa dimaksimalkan.

* + - 1. **Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Hasil Pembangunan**

Berdasarkan hasil analisis menggunakan SPSS 20 menunjukkan bahwa retribusi daerah berpengaruh negatif terhadap hasil pembangunan di Kabupaten Kolaka, yang berarti bahwa sumber penerimaan retribusi daerah tidak maksimal sehingga berpengaruh negatif terhadap pembangunan di Kabupaten Kolaka, retribusi daerah yaitu: retribusi jasa umum, jasa usaha dan retribusi jasa tertentu.

Dari data rekapitulasi pendapatan asli daerah Kabupaten Kolaka ada beberapa retribusi yang tidak mencapai target atau tidak memberikan kontribusi sama sekali, seperti retribusi jasa parkir realisasi yang diperoleh sangat jauh dari potensi yang dimiliki, kemudian dari dinas pendapatan dan dinas perhubungan sama sekali tidak memberikan kontribusi, begitu pula dengan retribusi jasa laboratorium tidak memberikan kontribusi, retribusi pemeriksaan kesahatan hewan sesudah dipotong realiasi yang diperoleh sangat jauh dari target yang ditetapkan bahkan tidak memberikan kontribusi sama sekali, retribusi izin usaha perikanan kepada orang atau pribadi yang tidak memberikan kotribusi sama sekali.

Potensi yang dimiliki Kabupaten Kolaka sangat baik hanya saja pemerintah belum maksimal mengelola potensi yang ada seperti halnya dengan retribusi pelayanan pasar los/ kios seharusnya setiap ukuran dibedakan retribusinya begitupula dengan lahan parkir perlu ditentukan targetnya sesuai dengan potensi dan luas wilayah, kemudian perlu melakukan kegiatan uji potensi dan pemeriksaan dilapangan yang dilaksanakan oleh para pejabat lingkungan dinas pendapatan sehingga kecurangan bisa dihindari serta melakukan dialog dengan wajib pajak untuk meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia melalui penambahan wawasan dibidang PAD dan meningkatkan pelayanan bagi masyarakat.

* + - 1. **Pengaruh Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Terhadap Hasil Pembangunan di Kabupaten Kolaka**

Dari hasil analisis yang telah dilakukan menggunakan SPSS 20 menunjukkan tidak ada pengaruh yang signifikan hasil pengelolaan kekayaan daerah terhadap pembangunan di Kabupaten Kolaka. salah-satu faktor penyebabnya adalah masih kurangnya kontribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah terhadap pembangunan, sesuai dengan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 satu-satunya yang menjadi sumber keuangan hasil pengelolaan kekayaan daerah Kabupaten Kolaka adalah bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta.

Berdasarkan ketentuan di atas maka walaupun perusahaan daerah merupakan salah satu komponen yang diharapkan dapat memberikan kontribusinya hagi pendapatan daerah, tapi sifat utama dan perusahaan daerah bukanlah berorientasi pada profit (keuntungan), akan tetapi justru dalam memberikan jasa dan menyelenggarakan kemanfaatan umum. Atau dengan perkataan lain, perusahaan daerah menjalankan fungsi ganda yang harus tetap menjamin keseimbangannya, yakni fungsi sosial dan fungsi ekonomi.

Walaupun demikian hal ini tidak berarti bahwa perusahaan daerah tidak dapat memberikan kontribusi maksimal bagi ketangguhan keuangan daerah. Pemenuhan fungsi sosial oleh perusahaan daerah dan keharusan untuk mendapat keuntungan yang memungkinkan perusahaan daerah dapat memberikan sumbangan bagi pendapatan daerah. Artinya bahwa pemenuhan fungsi sosial perusahaan daerah dapat berjalan seiring dengan pemenuhan fungsi ekonominya sebagal badan ekonomi yang bertujuan untuk mendapatkan laba/keuntungan. Hal ini dapat berjalan apabila profesionalisme dalam pengelolaannya dapat diwujudkan. (Josef Kaho Riwu, 2005:188)

* + - 1. **Pengaruh Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah terhadap Hasil Pembangunan**

Adapun pengaruh lain-lain pendapatan asli daerah yang sah berdasarkan hasil analisis menggunakan SPSS 20 menunjukkan ada pengaruh positif yang signifikan lain-lain pendapatan asli daerah terhadap pembangunan di Kabupaten Kolaka. Dari keempat sumber keuangan daerah yang paling besar kontribusinya terhadap pembangunan adalah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, pencapaian target pendapatan asli daerah tidak terlepas dari kemampuan daerah yang diupayakan sesuai dengan potensi daerah dalam memaksimalkan penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Yang menjadi sumber keuangan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang dikelola pemerintah Kabupaten kolaka yaitu: penerimaan jasa giro, pendapatan denda retribusi, pendapatan dan pengembalian, pendapatan dari angsuran/ cicilan penjualan, hasil dari pemamfaatan kekayaan daerah, pemamfaatan dari badan/ lembaga. Pencapaian lain-lain pendapatan asli daerah yang sah bukan tidak mungkin dapat ditingkatkan apabila mampu menaksir potensi yang ada serta meningkatkan pengawasan.

* + - 1. **Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah dan Lain-lain PAD yang sah terhadap Hasil Pembangunan di Kabupaten Kolaka**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan kemudian dianalisis menggunakan SPSS 20 menunjukkan bahwa secara bersama-sama pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain PAD yang sah mempunyai pengaruh terhadap hasil pembangunan di Kabupaten Kolaka dengan asumsi bahwa besarnya kontribusi sumber pendapatan asli daerah secara bersama-sama berbanding lurus dengan anggaran APBD yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah untuk pembangunan.

Pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain PAD yang sah terhadap hasil pembangunan cukup besar dapat dilihat pada analisis data menggunakan SPSS diperoleh nilai R sebesar 93,1% berarti bahwa hubungan antar variabel memiliki hubungan yang kuat, dengan nili koefisien determinasi sebesar 0,866 yang berati bahwa 86,6% dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain PAD yang sah mempunyai pengaruh terhadap hasil pembangunan, dan 13,4% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak masuk dalam penelitian ini.

Besarnya anggaran pembangunan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah yang direalisasikan dalam APBD berbanding lurus dengan hasil pembangunan di Kabupaten Kolaka dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kolaka menduduki urutan ke 3 dari 17 Kabupaten yang ada di Sulawesi Tenggara setelah Kota Kendari dan Kota Bau-bau, kemudian indeks kemiskinan semakin menurun meskipun masih terbilang tinggi jika dibandingkan dengan daerah lain yang ada di Sulawesi Tenggara namun usaha pemerintah untuk menurunkan kemiskinan dapat dilihat, kemudian sarana penunjang kejahteraan masyarakat ditingkatkan mulai dari jumlah sekolah baik sekolah dasar sampai sekolah menengah dan disediakan puskesmas setiap desa untuk memudahkan masyarakat.

**PENUTUP**

1. **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dalam penelitian kuantitatif yang dilakukan di Kabupaten Kolaka dengan judul pengaruh pendapatan asli daerah terhadap hasil pembangunan di Kabupaten Kolaka. Mengacu pada rumusan masalah maka kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Variabel pajak daerah (X1) tidak ada pengaruh yang signifikan terhadap hasil pembangunan di Kabupaten Kolaka.
2. Variabel Retribusi Daerah (X2) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap hasil pembangunan di kabupaten Kolaka.
3. Variabel hasil pengelolaan kekayaan daerah (X3) tidak ada pengaruh dan signifikan terhadap hasil pembangunan di Kabupaten Kolaka.
4. Variabel lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (X4) berpengaruh positif dan signifikan terhadap hasil pembangunan di Kabupaten Kolaka.
5. Secara simultan, variabel pajak daerah (X1), retribusi daerah (X2), hasil pengelolaan kekayaan daerah (X3) dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (X4) berpengaruh positif dan signifikan terhadap hasil pembangunan di Kabupaten Kolaka. Besarnya pengaruh terhadap hasil pembangunan sebesar 86,6 persen dan 13,4 persen dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak masuk dalam penelitian ini.
6. **Saran**

Dari kesimpulan yang telah diperoleh dalam penelitian ini, maka yang menjadi saran yang diajukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah perlu melakukan penggalian pajak serta menjaring potensi pajak baru untuk meningkatkan penerimaan pendapatan daerah dan melakukan pemantauan dan pemeriksaan terhadap wajib pajak secara berkala.
2. Diharapkan pemerintah Kabupaten Kolaka memberikan pemahaman kepada masyarakat serta perusahaan-perusahaan daerah tentang wajib pajak dengan cara melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan pentingnya keuangan daerah untuk pembangunan.
3. Pemerintah Kabupaten Kolaka dalam mentukan target pendapatan asli daerah perlu melihat potensi daerah sehingga penerimaan keuangan daerah bisa dimaksimalkan dan menjadi motivasi bagi daerah dalam pencapaian target untuk meningkatkan keuangan daerah.

**DAFTAR PUSTAKA**

Aziz. 1997. *Pendapatan Asli daerah.* Jakarta: Erlangga.

Atep Adya Barata. *Pendapatan Asli Daerah. “Terjemahan Barata*. Jakarta 2004

Hajar, 2015. Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatn Asli Daerah (PAD) di Kota Makassar*. Tesis.* Tidak diterbitkan. Makassar: Program Pascasarjana UNM Makassar

Aryani, 2014. Analisis Pertumbuhan Serta Efektivitas dan Efesiensi Pemungutan Pajak Daerah Kabuapten Bayuasin. *Jurnal, (online).*(http://www.slideshare.net/Faridaabraham/artikel-farida-aryani-stier-pertumbuhan-efektivitasefisiensi-pajak-daerah-jieunbara-eds-oktober-2014-45052574)

Aliwear*.* Lingkup dan Langkah-langkah Membangun Daerah*.* 16 Mei 2012. (<https://alisadikinwear.wordpress.com/2012/05/06/lingkup-dan-langkah-langkah-pembangunan-daerah/>, Diakses 02 Januari 2017)

Basuki, U. 2009. Penentu Sektor Unggulan Dalam Pembangunan Daerah: Studi Kasus Di Kabupaten Ogan Komering Ilir. *Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 10(1), 34-50

Gujarati, 1995. *Ekonometrika Dasar,* terjemahan Sumarno Zain, Jakarta: Erlangga

Geodhart, 1982. *Garis-garis besar Ilmu Keungan Negara.* Jakarta: Djambatan

Hendri, 2009. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah di Kabuapten Toba Samosir. *Tesis.* Diterbitkan. Medan: Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatra Utara Medan.

Henryk, 2013. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Kelurahan Sungai Keledang Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda*. Jurnal Ilmu Pemerintahan,* 1(2), 612 – 625.

Nurkurniana, 2013. Penagaruh Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), dan Pengeluaran Pemerintah Daerah Terhadap Produk Domestik Bruto (PDRB) Di Kabuapten Bone. *Tesis.* Tidak diterbitkan. Makassar: Program Pascasarjana UNM Makassar.

Kuncoro, 2010. *Ekonomika Pembangunan.* Jakarta: Erlangga

Sandi, 2014. Analisis Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Bone. *Tesis.* Tidak diterbitkan. Makassar: Program Pascasarjana UNM Makassar

Sugiyono, 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D.* Bandung: Alfabeta.

Sutrisno, 1984. *Konsep Pendapatan Asli Daerah.* Rajawali

Supriatna Tjahya, 1993. *Sistem Administrasi Pemerintahan di Daerah.* Jakarta: Bumi askara

Soares. R. M. 2015*.* Peranan Pemerintah Daerah Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,* 4(2), 2442-6962

Salam., Bangkona. 2012. *Pedoman Penulisan Tesis dan Disertasi.* Makassar: Badan Penerbit UNM

*Seri Analisis Pembangunan Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara 2015.* Kendari

*Penyusunana Rencana Kerja Pembangunan Derah (RKPD) Tahun 2015.* Jakarta: Anugrah Pangripta Nusantara Provinsi

Tahir, 2014. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Kabupaten Mamuju*. Tesis.* Tidak diterbitkan. Makassar: Program Pascasarjana UNM Makassar.

Mulyadi, 2012. Pengaruh Pendapatn Asli Daerah (PAD) Terhadap Penyelenggaraan Pembangunan Daerah (Suatu Studi di Kabupaten Kepulauan Sula)

Wega, 2010. Analisis faktor – faktor yang mempengaruhi pendapatan asli daerah (PAD) kabupaten Sragen (1990-2005*).* *Skripsi*. Diterbitkan. Surakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta

*Undang-undang Republik Indonesia No.12 Tahun 2008 Tentang Pemerintah Daerah.* Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59

*Udang-Undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2004 Tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438

*Undang-Undang Republik Indonesia No.28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.*  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049

*Undang-Undang Republik Indonesia No 33 Tahun 200 Tentang Pendapatan Asli Daerah.* Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2010 Tentang Jenis Pajak Daerah.* Lembaran Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka

*Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Pasal 10 tentang Pemerintahan Daerah.* Lembaran Negara Republik Indonesia

Zulia Hanum. 2011. Analisis Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada Kabupaten Serdang Bedagai. *Jurnal Manajemen dan Bisnis,* 11(1),1693-7619